

SINGOSARI

Jurnal Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) Wilayah Jawa Timur

Volume 2 Nomor 1 2025

Available online at <http://jurnal.sekawansiji.org/index.php/singosari>

History of Women in the Pre-Independence Era

Sejarah Perempuan Era Pra Kemerdekaan

Annisa Fitri Lestari ^{1*}

¹Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

(*) Corresponding Author
annisalestari84@gmail.com

Abstract

Received: 11 Februari 2025

Revised: 27 Maret 2025

Accepted: 21 Oktober 2025

Keywords:

Women's history; Pre-independence era; Gender roles; Colonial period

Women as citizens of society, have the full right to think about the problems of society, seek solutions to the problems faced and try to build the community in accordance with their desires and beliefs. The struggle of women in 1928 began with the Indonesian Women's Congress which was first held in Yogyakarta on December 22, 1928. This research method uses the document study method and with the results of Women's organizations in the pre- independence era starting with the pppi. And there were many female figures who fought for women's independence.

PENDAHULUAN

Perempuan sebagai warga masyarakat, mempunyai hak sepenuhnya untuk memikirkan masalah-masalah masyarakat, mencari penyelesaian atas soal-soal yang dihadapi serta berusaha membangun masyarakat itu sesuai dengan keinginan dan keyakinannya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik dalam arti yang seluas-luasnya.

Sejak akhir abad ke-19 hingga saat ini, setiap percakapan tentang kedudukan perempuan hampir selalu berarti membicarakan hak-hak perempuan. Dalam sejarah 30 tahunnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang pertama tentang kedudukan perempuan dari tanggal 10 hingga 24 Februari 1947. Sejak itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan banyak resolusi yang meminta negara-negara anggotanya untuk memperlakukan hak perempuan dengan kaum laki-laki dengan penuh perhatian hak-hak perdata, khususnya dalam hal perkawinan dan hak-hak perkawinan (Hartimah & Rauf, 2003). Setiap detail pergerakan sosial yang diinisiasi oleh wanita tercatat dalam Sejarah negara. Para tokoh perempuan ini sebenarnya meletakkan dasar perjuangan Perempuan untuk hak yang sama di ruang publik. Perempuan tidak stagnan dalam satu aspek kehidupan; mereka memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hampir sebagian besar pembangunan manusia lintas bidang dilakukan oleh kaum perempuan. Para tokoh sejarah perempuan sepenuhnya mengambil bagian dalam pergerakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Khususnya, perempuan memainkan peran yang signifikan dalam pendidikan bangsa (Pradita, 2020).

Dalam hal yang lebih khusus, perempuan memiliki andil besar dalam pendidikan bangsa. Bawa dalam setiap bidang kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun kesetaraan gender. Dalam masyarakat, penggunaan kata "perempuan" dan "wanita" kerap dipertukarkan. Definisi kata dan makna yang terkandung di dalamnya berkembang sesuai budaya kemasyarakatan. Dahulu, wanita memiliki arti yang agung, luhur, dan biasa digunakan sebagai nama lembaga atau organisasi, seperti Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan Dharma Wanita. Seiring berjalannya waktu, kata perempuan lebih lazim digunakan, khususnya dalam nomenklatur organisasi, seperti Komite Pembela Kaum Buruh Perempuan Indonesia dan Komnas Perempuan (Pokhrel, 2024).

Perjuangan perempuan pada tahun 1928 dimulai dengan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diadakan di Yogyakarta pada 22 Desember 1928, yang menjadikannya hari ibu. Sejarah kebangsaan tidak terlepas dari sudut pandang perempuan, karena perempuan juga ikut andil didalam sejarah Indonesia. Awal perjuangan perempuan dengan cara mendirikan berbagai organisasi perempuan dengan tujuan kemerdekaan. Urgensi penelitian ini adalah untuk Mengetahui Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia serta tokoh dan jenis organisasinya.

SINGOSARI

Jurnal Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) Wilayah Jawa Timur

Volume 2 Nomor 1 2025

Available online at <http://jurnal.sekawansiji.org/index.php/singosari>

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiono, 2019). Metode penelitian kualitatif yang menekankan pada studi literatur dokumen dan studi deskriptif. Studi dokumen adalah mencari informasi dari sumber tertulis seperti jurnal-jurnal umum maupun dari buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun media elektronik. Tujuan dari menggunakan metode kualitatif adalah untuk menjelaskan secara jelas mengenai perkembangan ekonomi. Analisis data dilakukan dengan bantuan dari jurnal dan interpretasi kualitatif, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berarti dari data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah perempuan Indonesia adalah perjuangan untuk kesetaraan, tetapi tidak banyak yang dicatat dalam sejarahnya. Sejarah Indonesia lebih banyak berbicara tentang kolonialisme secara keseluruhan, termasuk tokoh-tokohnya. Banyak perempuan yang terlibat dalam kolonialisme ini dari berbagai latar belakang dan kisah yang dapat digunakan sebagai pelajaran bagi perempuan di masa depan (Dalam & Feminisme, 2022).

A. Perjuangan Perempuan Pra Kemerdekaan

1. Perjuangan Perempuan Sebelum Masa Kemerdekaan

Salah satu bentuk perjuangan perempuan Indonesia sebelum kemerdekaan adalah peperangan perempuan yang terintegrasi untuk melawan kolonialisme. Pada masa itu, para wanita berpartisipasi dalam perang melawan para penjajah di setiap bidang. Nama-nama besar pejuang perempuan Indonesia termasuk Christina Marta Tiahahu, seorang gadis dari Maluku Tengah yang berperang melawan tentara belanda; dan Cut Nyak Dien, seorang Pahlawan Nasional Indonesia dari Aceh yang berperang melawan belanda selama perang Aceh.

Perjuangan perempuan sebelum kemerdekaan-perjuangan melawan penjajah pada abad ke-19-berawal dari keinginan perempuan untuk mendapatkan keadilan karena dianggap bahwa perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal ini mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan dan berdampak pada peristiwa politik, seperti meningkatnya jumlah perempuan yang belajar dan berpikir kritis.

Sebelum kemerdekaan, perempuan Indonesia berpartisipasi dalam perjuangan kolektif untuk melawan kolonialisme dalam bidang mereka sendiri. Ada beberapa kelompok perempuan pada tahun 1800-an yang memperjuangkan prinsip-prinsip dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta melindungi budaya asli Indonesia dengan melawan elemen-elemen dari budaya Barat yang dianggap tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Sifat nasionalisme adalah fase perjuangan.

Salah satu organisasi yang memiliki keberanian memberikan mosi kepada Gubernur Jendral, Poetri Mahardika, menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama di mata hukum, menurut Sukanti Suryochondro. Pada tanggal 28 Oktober 1928, sumpah pemuda, bersama dengan Kongres Perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928. Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) adalah federasi organisasi perempuan yang didirikan sebagai hasil dari Kongres Perempuan pertama, yang memicu persatuan nasional. Kemudian PPPI berubah nama menjadi PPII (Pererikatan Perkumpulan Istri Indonesia). Usaha kongkrit yang dilakukan oleh PPII sebagai suatu organisasi perempuan adalah dengan menerbitkan majalah sendiri, giat mengajarkan pendidikan bagi kaum perempuan serta membentuk panitia perdagangan perempuan dan anak-anak.

Tujuan dari pembentukan semua organisasi-organisasi perempuan sebelum tahun 1928 masih bersifat kedaerahan atau kesukuan adalah ingin menggalakan pendidikan dan pengajaran bagi kaum perempuan, perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga serta untuk meningkatkan kecapakan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

2. Pada Masa Jepang

Semasa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 semua organisasi perempuan Indonesia dilarang beroperasi dan melakukan kegiatan apapun kecuali atas perintah dan izin pemerintahan Jepang. Hanya ada satu organisasi perempuan di bawah kekuasaan Jepang yang diizinkan hidup dan bertahan dalam melakukan aktifitas kegiatannya yaitu Fujinkai yang dibentuk di daerah-daerah dengan ketuanya istri masing-masing kepala daerah dan harus menggerakkan tenaga-tenaga perempuan di

SINGOSARI

Jurnal Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) Wilayah Jawa Timur

Volume 2 Nomor 1 2025

Available online at <http://jurnal.sekawansiji.org/index.php/singosari>

tempatnya masing-masing. Kegiatan organisasi ini meliputi pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial. Kaum perempuan yang aktif dan giat dalam organisasi Fujinkai ini utamanya adalah para istri pegawai negeri.

Pada periode kependudukan Jepang di Indonesia, sifat pergerakan perempuan mengalami kemunduran serta degradasi. Hal ini dikarenakan semua organisasi perempuan tidak dapat bergerak secara bebas serta hanya boleh berdiri apabila sudah ada komando dari penguasa dalam hal ini pemerintah Jepang. Akan tetapi, setelah Jepang mengalami kekalahan dari Sekutu pada perang dunia ke II serta adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, maka peran dari organisasi perempuan mengalami peningkatan kembali. Hal ini dibuktikan dengan turut serta kaum perempuan berjuang bersama kaum laki-laki dan bahu-membahu mengangkat senjata untuk bertempur dalam medan perang melawan pemerintah Belanda yang ingin berusaha merebut kembali Indonesia merdeka. Maka dinamika perkembangan perjuangan organisasi perempuan pada masa kemerdekaan Indonesia memasuki babak baru.

3. Masa Kemerdekaan

Wanita Republik Indonesia (WANI) adalah organisasi perempuan yang dibentuk setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mereka membangun dapur umum untuk membantu korban kebakaran yang dilakukan NICA. Pada tahun 1946, federasi perempuan kembali dibentuk dengan nama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Solo.

Kongres Wanita Indonesia ke-5 kemudian diadakan kembali di Madiun. Karena kebijakan pemerintah untuk menghentikan blokade ekonomi dan politik Barat dengan menjalin hubungan luar negeri, Kowani menjadi anggota Federasi Perempuan Internasional Demokrat (WIDF) dan bekerja sama dengan mereka untuk mendukung pergerakan perjuangan perempuan.

Kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Soeharto setelah adanya Undang-undang Perkawinan tahun 1974 untuk mengupayakan tidak adannya poligami dengan mengatur para pegawai negeri yang berpihak pada perempuan untuk tidak melakukan pembatasan yang ketat terhadap pegawai laki – laki yang mempunyai keinginan untuk poligami. Adannya pembentukan Kementerian Muda Urusan Peranan Perempuan pada Kabinet Pembangunan pada tahun 1974, yang berakhir menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tugas dari Menteri Negara Pemberdayaan yaitu meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan yang diberikan dari negara untuk perempuan dalam pemenuhan haknya.

B. Tokoh-tokoh Perempuan

1. Raden Ajeng Kartini (1879-1904)

Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Ia memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kesetaraan gender. Karya-karyanya, termasuk surat-surat yang dipublikasikan, menjadi inspirasi bagi banyak wanita di Indonesia dan diakui sebagai simbol perjuangan untuk hak-hak Perempuan. Kartini terkenal berkat surat-suratnya yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul *Door Duisternis tot Licht* (*Habis Gelap Terbitlah Terang*). Berkat jasa-jasanya di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan pada era kolonial, RA Kartini dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia melalui SK Presiden Nomor 108 Tahun 1964, 2 Mei 1964. (Hartimah & Rauf, 2003)

2. Dewi Sartika (1884-1947)

Dewi Sartika lahir di Bandung dan dikenal sebagai pendiri Sekolah Isteri, sekolah pertama untuk perempuan di Hindia Belanda. Ia berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan, melawan stereotip yang ada pada zamannya. Upayanya dalam pendidikan membuatnya diakui sebagai Pahlawan Nasional. Sejak kecil Dewi Sartika sudah tertarik dengan dunia pendidikan. Saat remaja beliau pun mengajarkan baca tulis bagi warga sekitar. Karena usahanya dalam pendidikan untuk kaum wanita di Indonesia, Dewi Sartika akhirnya mendapat penghargaan berupa Pahlawan Nasional dari negara.

SINGOSARI

Jurnal Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) Wilayah Jawa Timur

Volume 2 Nomor 1 2025

Available online at <http://jurnal.sekawansiji.org/index.php/singosari>

3. Cut Nyak Dhien (1850-1908)

Cut Nyak Dhien adalah pahlawan dari Aceh yang terlibat langsung dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda selama Perang Aceh. Ia dikenal karena keberaniannya dan dedikasinya dalam memimpin pasukan wanita. Cut Nyak Dhien diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Cut Nyak Dien termasuk pahlawan wanita yang ikut berperang bersama masyarakat Aceh, tanah kelahirannya. Pada 1873, ketika Perang Aceh pecah, suami Cut Nyak Dien, Teuku Ibrahim Lamnga, meninggal dunia, gugur di medan pertempuran. Sejak itu, ia melanjutkan perjuangan suaminya melawan penjajahan Belanda. Ia terus bergerilya bersama pejuang Nusantara lainnya hingga usianya menginjak 50 tahun. Pahlawan wanita nasional asal Aceh ini diberi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia melalui SK Presiden Nomor 108 Tahun 1964, 2 Mei 1964.

4. Cut Nyak Meutia

Pahlawan nasional wanita asal Aceh lainnya adalah Cut Nyak Meutia. Dikutip dari buku Mengenal Pahlawan Indonesia (ed. Revisi) oleh Arya Ajisaka dan Anna Maria Fitrawati (2008), ia merupakan istri dari Teuku Muhammad atau Teuku Cik Tunong. Pada Maret 1905, Cik Tunong berhasil ditangkap Belanda kemudian dihukum mati. Sebelum meninggal ia berpesan kepada sahabatnya Pang Nanggroe untuk menikahi istrinya dan merawat anaknya. Lalu, Cut Meutia pun menikah dengan Pang Nanggroe dan bergabung ke dalam pasukan di bawah pimpinan Teuku Muda Gantoe. Setelah suaminya tewas, Cut Nyak.

Meutia bangkit dan terus melakukan perlawanan untuk menyerang dan merampas pos-pos kolonial. Saat tengah melawan pasukan Belanda, Cut Meutia gugur dengan kondisi butiran timah panas bersarang di kepala dan dadanya. Berkat perjuangannya, ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 107/1964.

C. Organisasi Perempuan Pra Kemerdekaan

Organisasi perempuan pra kemerdekaan di Indonesia mempunyai peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta meningkatkan kesadaran sosial. Berikut adalah beberapa organisasi yang signifikan pada masa itu:

1. Poetri Mardika

Didirikan pada tahun 1912 di Batavia, Poetri Mardika adalah organisasi perempuan pertama yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Organisasi ini menerbitkan surat kabar dengan nama yang sama untuk mengkampanyekan isu-isu terkait hak-hak perempuan dan pendidikan.

2. PPI (Persatuan Perempuan Indonesia)

Persatuan Perempuan Indonesia (PPI) adalah organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 1928 dan berfokus pada meningkatkan hak-hak perempuan dan kesejahteraan mereka di Indonesia. PPI berperan penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan perempuan untuk hak-hak mereka. PPI didirikan sebagai hasil dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yang digelar pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Kongres ini adalah cikal bakal Hari Ibu dan berfokus pada meningkatkan kesadaran dan kemauan perempuan untuk berpartisipasi dalam gerakan kemerdekaan dan perjuangan perempuan untuk hak-hak mereka. Kongres Perempuan I menghasilkan kesepakatan utama, yaitu pembentukan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

PPPI pun menjadi federasi atau gabungan dari berbagai organisasi perempuan pertama di Indonesia. PPI adalah organisasi yang terdiri dari beberapa organisasi perempuan lainnya, seperti Wanita Oetama, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia (PI), Aisyiyah, Jong Islamieten Bond (JIB) bagian perempuan, Wanita Katholik, dan Jong Java (JJ) bagian perempuan. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan, sosial, dan kebudayaan perempuan Indonesia.

3. Fujinkai

Didirikan oleh pemerintah Jepang selama pendudukan, Fujinkai adalah organisasi yang menampung semua bentuk kegiatan wanita, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Organisasi ini bertujuan untuk menggerakkan tenaga wanita dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Gerwani

Gerakan Wanita Indonesia adalah sebuah organisasi perempuan yang sangat berpengaruh di Indonesia pada masa lalu, terutama sebelum peristiwa 30 September 1965. Organisasi ini didirikan pada

SINGOSARI

Jurnal Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) Wilayah Jawa Timur

Volume 2 Nomor 1 2025

Available online at <http://jurnal.sekawansiji.org/index.php/singosari>

tahun 1953 sebagai gabungan dari beberapa organisasi perempuan yang ada sebelumnya. Gerwani memiliki tujuan mulia, yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan politik. Gerwani juga berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

5. PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia)

Adalah organisasi perempuan yang lahir dari semangat persatuan para wanita Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun bangsa. Dibentuk pada tahun 1945, PERWARI memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak awal berdirinya, PERWARI aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Para anggotanya tidak hanya berperan di belakang layar, tetapi juga ikut berjuang di garis depan. Mereka mendirikan dapur umum, rumah sakit darurat, dan memberikan dukungan moril kepada para pejuang. Setelah Indonesia merdeka, PERWARI terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Organisasi ini fokus pada pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

KESIMPULAN

Periode pra kemerdekaan Indonesia ditandai dengan integrasi sistem politik negara menuju ideologi nasionalis yang bersatu. Hal ini menyebabkan partisipasi berbagai partai politik dalam perjuangan politik negara, termasuk Majelis Nasional Indonesia (NAI) dan Kongres Nasional Indonesia (Kowani).

Pada masa pasca keemerdekaan, pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif, dengan beberapa anggota PPPI (Perempuan Perkumpulan Istri Indonesia) membentuk PPII (Pererikatan Perkumpulan Istri Indonesia). PPII bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat posisi negara sebagai negara kesatuan.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, semua organisasi politik bergerak dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk pembentukan Majelis Nasional Indonesia (WANI). Namun, perkembangan organisasi-organisasi ini ditandai dengan munculnya Kongres Nasional Indonesia (Kowani) dan pembentukan Kongres Nasional Indonesia (Kowani). Kesimpulannya, periode pasca-perang di Indonesia ditandai dengan integrasi sistem politik negara, kebangkitan WANI, dan pembentukan Kongres Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, S., & Jasyusman, I. (2023). Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada Masa Pendudukan. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 6(1), 1–12. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari>
- Dadan Adi Kurniawan, Syaffrina Fadhilatul Nikmah, & Nasta Ayundra Oktavian Mahardi. (2024). Portrait of Education Aspects in Indonesia During the Japanese Occupation (1942-1945). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 695–705. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3536>
- Firmansyah, A., & Ramadhan, F. (2023). Struktur Pendidikan di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah: Dari Masa Prasejarah Hingga Penjajahan Jepang. *Chronologia*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.22236/jhe.v5i1.11627>
- Hudaibah, H., & Putra Karwana, M. A. (2022). Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Danadyaksa Historica*, 1(2), 97. <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4243>
- Juwitasari, R. (2019). The Japanese Legacy: What's Still Left in The Education System in Indonesia? *Thammasat Review*, 22(1), 64–76. <https://doi.org/10.14456/tureview.2019.4>
- Lu, Y. (2024). Exploring the Paradox of Hope and Ambivalence in Short-lived Japanese Colonialism in Indonesia. *Transactions on Social Science, Education and Humanities Research*, 5, 426–431. <https://doi.org/10.62051/nba42308>
- Nurrahma, E. G. (2023). Menolak Sarkas: Mengenal Secarik Dampak Positif Dari Kebijakan Pendudukan Jepang Di Indonesia Sebagai Sumber Belajar Siswa. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(1), 53–65. <https://doi.org/10.22437/jejak.v3i1.24667>
- Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 済無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 9–10. Ramadhani, S. (2021). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 8(1), 10–23. <https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3410>
- Rohman, M. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama*

SINGOSARI

Jurnal Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) Wilayah Jawa Timur

Volume 2 Nomor 1 2025

Available online at <http://jurnal.sekawansiji.org/index.php/singosari>

Islam, 02(Kebijakan Pendidikan Islam), 17–18.

Sugiyono, Prof Dr. "Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D." Penerbit CV.

Alfabeta: Bandung 225, no. 87 (2017): 48-61.

Sosial, F. I. (2022). Program Studi S1 Pendidikan Sejarah. 6130017053, 0–10.<https://fis.unj.ac.id/program-studi-pendidikan-sejarah/>

Susanti, E., Duha, D. S., & Riski, F. (2024). Keadaan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. 2(2).